

ALGORITMA MEDIA SOSIAL DAN POLARISASI POLITIK DALAM DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA

SOCIAL MEDIA ALGORITHMS AND POLITICAL POLARIZATION IN DIGITAL DEMOCRACY IN INDONESIA

Yassirli Amri, Lara Indah Yandri

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Yassirliamri09@gmail.com, laraindahyandri@gmail.com

ABSTRAK : Perkembangan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi politik di Indonesia, terutama melalui penggunaan algoritma yang mengatur distribusi informasi kepada pengguna. Algoritma media sosial dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, namun dalam praktiknya justru berpotensi memperkuat polarisasi politik melalui mekanisme filter bubble dan echo chamber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran algoritma media sosial dalam membentuk polarisasi politik serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis melalui studi literatur dan analisis kebijakan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan lembaga, serta regulasi terkait teknologi informasi dan demokrasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma media sosial berkontribusi signifikan dalam memperkuat segmentasi politik masyarakat, mempersempit ruang dialog publik, serta meningkatkan penyebaran disinformasi politik. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas deliberasi publik dan mengancam prinsip demokrasi inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tantangan demokrasi digital di Indonesia tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga politis dan regulatif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang adaptif, transparansi algoritma, serta peningkatan literasi digital masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi di era digital.

Kata Kunci: demokrasi digital, polarisasi politik, algoritma informasi, kebijakan teknologi, literasi digital

ABSTRACT : The development of social media has transformed the landscape of political communication in Indonesia, particularly through algorithms that regulate information distribution to users. Social media algorithms are designed to increase user engagement; however, in practice, they tend to intensify political polarization through filter bubble and echo chamber mechanisms. This study aims to analyze the role of social media algorithms in shaping political polarization and their impact on the quality of digital democracy in Indonesia. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method through literature review and policy analysis. Data were collected from academic journals, institutional reports, and regulations related to information technology and digital democracy. The findings indicate that social media algorithms significantly contribute to political segmentation, narrow public dialogue spaces, and accelerate the spread of political disinformation. These conditions negatively affect public deliberation and threaten inclusive democratic principles. This study concludes that challenges to digital democracy in Indonesia are not merely technological but also political and regulatory. Therefore, adaptive public policies, algorithm transparency, and enhanced digital literacy are essential to safeguarding democracy in the digital era.

Keywords: digital democracy, political polarization, information algorithms, technology policy, digital literacy

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam praktik demokrasi modern. Digitalisasi ruang publik melalui internet dan media sosial tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga mentransformasi pola interaksi politik antara warga negara, aktor politik, dan institusi negara. Media sosial kini berfungsi sebagai arena utama diskursus politik, pembentukan opini publik, serta mobilisasi politik, khususnya di negara demokrasi berkembang seperti Indonesia. Literatur politik kontemporer menunjukkan bahwa demokrasi digital pada awalnya dipandang sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Media digital diyakini mampu menurunkan hambatan partisipasi, mempercepat arus informasi, serta memberikan ruang bagi suara kelompok marginal. Namun, seiring dengan meningkatnya peran platform digital, muncul berbagai persoalan baru yang justru menantang kualitas demokrasi itu sendiri.

Salah satu isu krusial dalam demokrasi digital adalah dominasi algoritma media sosial dalam mengatur arus informasi publik. Algoritma berfungsi sebagai sistem otomatis yang menentukan konten apa yang dilihat pengguna berdasarkan analisis data perilaku, preferensi, dan interaksi sebelumnya. Dalam literatur sistem informasi, algoritma dipahami sebagai instrumen efisiensi dan personalisasi. Namun, dalam perspektif ilmu politik, algoritma tidak lagi bersifat netral karena memiliki dampak langsung terhadap struktur komunikasi politik dan distribusi kekuasaan informasi. Berbagai studi menunjukkan bahwa algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten yang meningkatkan keterlibatan pengguna, seperti konten emosional, provokatif, dan kontroversial. Dalam konteks politik, mekanisme ini berpotensi memperkuat narasi ekstrem dan menyederhanakan kompleksitas isu kebijakan menjadi konflik biner. Akibatnya, ruang publik digital semakin dipenuhi oleh wacana politik yang terpolarisasi dan minim dialog substantif.

Fenomena polarisasi politik yang dimediasi oleh algoritma media sosial telah menjadi perhatian utama dalam kajian demokrasi digital. Polarisasi tidak hanya mencerminkan perbedaan pandangan politik yang wajar dalam demokrasi, tetapi juga menunjukkan keterbelahan sosial yang tajam dan berkelanjutan. Literatur menyebutkan bahwa algoritma berkontribusi terhadap pembentukan *filter bubble* dan *echo chamber*, di mana individu hanya terpapar informasi yang sejalan dengan pandangan politiknya. Kondisi ini mengurangi paparan terhadap perspektif alternatif dan mempersempit ruang deliberasi publik. Di Indonesia, polarisasi politik berbasis media sosial semakin menguat seiring dengan meningkatnya penggunaan platform digital dalam kontestasi politik, khususnya pada pemilu nasional dan lokal. Media sosial menjadi sarana utama kampanye politik, penyebaran pesan ideologis, serta mobilisasi dukungan. Namun, literatur juga mencatat bahwa intensitas penggunaan media sosial dalam politik sering kali diiringi oleh meningkatnya disinformasi, ujaran kebencian, dan konflik identitas yang memperlemah kohesi sosial.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kualitas demokrasi digital di Indonesia. Demokrasi tidak hanya diukur dari aspek prosedural seperti pemilu, tetapi juga dari kualitas diskursus publik, rasionalitas pemilih, dan inklusivitas partisipasi politik. Ketika ruang publik digital didominasi oleh algoritma yang memperkuat polarisasi, maka fungsi deliberatif demokrasi berpotensi mengalami degradasi. Literatur kebijakan publik juga menyoroti keterbatasan regulasi negara dalam menghadapi tantangan demokrasi digital. Sebagian besar platform media sosial beroperasi sebagai entitas global dengan logika bisnis

yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan demokrasi nasional. Ketiadaan transparansi algoritma dan lemahnya pengawasan negara menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara platform digital dan institusi demokrasi. Dalam konteks ini, algoritma dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan baru dalam sistem politik digital.

Dari perspektif sistem informasi dan teknik informatika, algoritma media sosial merupakan artefak teknologi yang dirancang berdasarkan tujuan tertentu. Namun, literatur kritis menekankan bahwa desain sistem informasi selalu mengandung nilai dan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, analisis algoritma media sosial perlu ditempatkan dalam kerangka politik dan kebijakan, bukan semata-mata teknis. Pendekatan interdisipliner menjadi penting untuk memahami bagaimana teknologi membentuk praktik demokrasi kontemporer. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi dengan tingkat penetrasi media sosial yang tinggi. Tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai peran algoritma dalam polarisasi politik, demokrasi digital berisiko berkembang secara prosedural namun rapuh secara substantif. Penelitian ini berupaya mengisi celah kajian dengan mengkaji algoritma media sosial sebagai faktor struktural dalam polarisasi politik dan tantangan demokrasi digital di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran algoritma media sosial dalam membentuk polarisasi politik serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi digital di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian ilmu politik digital dengan mengintegrasikan perspektif sistem informasi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik yang lebih adaptif, etis, dan demokratis dalam pengelolaan ruang publik digital.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur (literature review) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk menganalisis secara kritis hubungan antara algoritma media sosial, polarisasi politik, dan demokrasi digital berdasarkan perkembangan kajian akademik dan kebijakan terkini. Data penelitian bersumber dari literatur sekunder berupa artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, serta dokumen kebijakan publik yang relevan. Literatur dipilih berdasarkan kriteria relevansi tema, kredibilitas sumber, dan keterbaruan publikasi. Penelusuran dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar dan DOAJ dengan kata kunci algoritma media sosial, polarisasi politik, dan demokrasi digital. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dan konseptual, dengan mengelompokkan literatur ke dalam tema utama, yaitu peran algoritma dalam komunikasi politik, mekanisme polarisasi digital, dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi. Untuk menjaga ketajaman analisis, dilakukan perbandingan lintas sumber guna mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan celah kajian. Melalui metode ini, penelitian menyajikan sintesis kritis yang menempatkan algoritma media sosial sebagai faktor struktural dalam polarisasi politik dan tantangan demokrasi digital di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Algoritma Media Sosial sebagai Aktor dalam Komunikasi Politik Digital

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa algoritma media sosial tidak lagi berfungsi sekadar sebagai sistem teknis untuk mengelola informasi, tetapi telah bertransformasi menjadi aktor penting dalam komunikasi politik digital. Algoritma bekerja dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data perilaku pengguna seperti riwayat pencarian, interaksi konten, preferensi politik, dan jaringan pertemanan. Berdasarkan data tersebut, sistem algoritmik kemudian menentukan konten apa yang paling relevan dan berpotensi meningkatkan keterlibatan pengguna. Dalam konteks politik, mekanisme ini berdampak signifikan terhadap pembentukan opini publik. Konten politik yang bersifat provokatif, emosional, dan kontroversial cenderung mendapatkan prioritas distribusi karena memiliki tingkat interaksi yang tinggi. Akibatnya, wacana politik yang muncul di ruang publik digital sering kali tidak merepresentasikan diskursus rasional yang seimbang, melainkan lebih menonjolkan konflik, sensasi, dan dikotomi politik.

Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas pada momentum politik nasional seperti pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah. Algoritma media sosial mempercepat penyebaran narasi politik tertentu secara masif dan berulang, sehingga membentuk persepsi publik yang terfragmentasi. Dengan demikian, algoritma media sosial berperan sebagai gatekeeper digital yang secara tidak langsung memengaruhi arah dan kualitas demokrasi.

2. Mekanisme Filter Bubble dan Echo Chamber dalam Polarisasi Politik

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah peran algoritma media sosial dalam menciptakan filter bubble dan echo chamber yang memperkuat polarisasi politik. Filter bubble terjadi ketika pengguna hanya terpapar informasi yang sejalan dengan preferensi dan pandangan politiknya, sementara informasi yang berbeda secara sistematis disaring atau diminimalkan. Kondisi ini diperparah oleh echo chamber, di mana pengguna berinteraksi dalam lingkungan digital yang homogen dan saling menguatkan pandangan politik yang sama.

Di Indonesia, mekanisme ini menyebabkan masyarakat terpolarisasi ke dalam kelompok-kelompok politik yang saling berseberangan dan minim dialog. Perbedaan pandangan politik tidak lagi dipahami sebagai bagian dari dinamika demokrasi, melainkan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas kelompok. Akibatnya, ruang deliberasi publik yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi justru menyempit. Polarisasi politik yang dipicu oleh algoritma juga berdampak pada meningkatnya intoleransi politik dan delegitimasi lawan politik. Diskursus publik lebih didominasi oleh serangan personal, stigma, dan narasi eksklusif dibandingkan dengan perdebatan kebijakan yang substantif. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma media sosial secara struktural mendorong fragmentasi sosial yang berpotensi melemahkan kohesi nasional.

3. Disinformasi Politik dan Manipulasi Opini Publik

Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa algoritma media sosial berkontribusi terhadap penyebaran disinformasi politik. Disinformasi sering kali dikemas dalam bentuk konten yang menarik secara emosional sehingga mudah viral dan mendapatkan prioritas distribusi algoritmik. Konten semacam ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga membentuk persepsi

politik yang bias dan irasional. Dalam konteks demokrasi Indonesia, disinformasi politik menjadi tantangan serius karena dapat memengaruhi perilaku pemilih, merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, dan memicu konflik horizontal. Algoritma yang berorientasi pada keterlibatan pengguna tidak secara efektif membedakan antara informasi valid dan informasi menyesatkan, sehingga membuka ruang bagi manipulasi opini publik oleh aktor politik tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan demokrasi digital bukan semata-mata akibat rendahnya literasi masyarakat, tetapi juga akibat desain sistem algoritmik yang tidak sensitif terhadap nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, algoritma media sosial memiliki implikasi politik yang signifikan dan tidak dapat dipandang sebagai entitas netral.

4. Dampak Polarisasi terhadap Kualitas Demokrasi Digital

Polarisasi politik yang diperkuat oleh algoritma media sosial berdampak langsung pada kualitas demokrasi digital di Indonesia. Demokrasi digital seharusnya memperluas partisipasi publik, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas politik. Namun, dalam praktiknya, polarisasi justru menghambat terciptanya ruang dialog yang inklusif dan rasional. Kondisi ini tercermin dari menurunnya kualitas diskusi publik di ruang digital yang lebih banyak diwarnai oleh konflik identitas dan sentimen emosional. Partisipasi politik yang muncul sering kali bersifat reaktif dan tidak berbasis pada pemahaman kebijakan yang mendalam. Akibatnya, demokrasi digital cenderung bersifat prosedural tanpa substansi deliberatif yang kuat. Lebih jauh, polarisasi politik juga berpotensi melemahkan legitimasi hasil demokrasi, terutama ketika kelompok yang kalah merasa teralienasi dan tidak terwakili. Hal ini menjadi tantangan serius bagi stabilitas politik dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

5. Tantangan Regulasi dan Kedaulatan Digital

Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi terkait algoritma media sosial di Indonesia masih bersifat terbatas dan reaktif. Negara belum memiliki mekanisme yang kuat untuk mengawasi transparansi algoritma dan dampaknya terhadap demokrasi. Ketergantungan pada platform digital global juga menimbulkan persoalan kedaulatan digital, di mana ruang publik nasional dikendalikan oleh kepentingan korporasi transnasional. Ketiadaan regulasi yang komprehensif membuat negara sulit memastikan bahwa algoritma media sosial beroperasi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan kepentingan publik. Hal ini menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara negara, platform digital, dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kebijakan publik yang adaptif dan berbasis bukti menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi tidak hanya harus mengatur konten, tetapi juga menyentuh aspek desain dan logika algoritma sebagai bagian dari sistem politik digital.

6. Peran Sistem Informasi dan Literasi Digital dalam Mitigasi Polarisasi

Dari perspektif sistem informasi, tantangan polarisasi politik dapat dimitigasi melalui desain sistem yang lebih etis dan berorientasi pada kepentingan publik. Transparansi algoritma, audit sistem rekomendasi, serta penerapan prinsip responsible AI menjadi langkah penting untuk mengurangi bias algoritmik. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat juga merupakan faktor kunci dalam menjaga kualitas demokrasi digital. Masyarakat perlu dibekali kemampuan kritis untuk memahami bagaimana algoritma bekerja dan bagaimana informasi politik dikonstruksi di ruang digital. Literasi digital tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga kesadaran politik dan etika berkomunikasi di ruang publik digital. Dengan demikian,

solusi terhadap tantangan demokrasi digital di Indonesia harus bersifat multidimensional, melibatkan pendekatan teknologi, kebijakan, dan pendidikan politik secara simultan.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma media sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk pola komunikasi politik dan memperkuat polarisasi politik di era demokrasi digital. Algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna secara tidak langsung membatasi keberagaman informasi politik yang diterima masyarakat melalui mekanisme filter bubble dan echo chamber. Kondisi ini berdampak pada penyempitan ruang dialog publik serta meningkatnya fragmentasi sosial-politik. Kajian ini juga menegaskan bahwa polarisasi politik yang dimediasi oleh algoritma media sosial tidak hanya merupakan persoalan teknologis, tetapi juga persoalan politik dan kebijakan publik. Dominasi platform digital global dalam mengelola ruang publik digital menghadirkan tantangan serius bagi negara dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama terkait transparansi algoritma, penyebaran disinformasi, dan perlindungan deliberasi publik yang sehat.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi digital menghadapi dilema antara perluasan partisipasi politik dan penurunan kualitas diskursus publik. Tingginya penetrasi media sosial tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya rasionalitas politik masyarakat. Sebaliknya, tanpa regulasi dan literasi digital yang memadai, algoritma media sosial justru berpotensi memperlemah nilai-nilai demokrasi substantif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan komprehensif dalam pengelolaan ruang publik digital. Transparansi algoritma, penguatan regulasi platform digital, serta peningkatan literasi digital-politik masyarakat menjadi langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif polarisasi politik. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian demokrasi digital dengan menempatkan algoritma sebagai aktor struktural dalam dinamika politik kontemporer. Secara praktis, temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan publik yang lebih demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2014). *Kuasa negara pada ranah politik lokal*. Jakarta: Kencana.
- Bakshy, E., Messing, S., & Adamic, L. A. (2015). Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. *Science*, 348(6239), 1130–1132.
- Habermas, J. (2006). Political communication in media society: Does democracy still enjoy an epistemic dimension? *Communication Theory*, 16(4), 411–426.
- Kreiss, D., McGregor, S. C., & Oshana, E. (2020). Algorithms and political communication. *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. Oxford University Press.
- Mukthie Fadjar. (2009). Pemilu yang demokratis dan berkualitas: Penyelesaian hukum pelanggaran pemilu dan PHPU. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 1–15.

Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2012). *Mapping the landscape of the media industry in contemporary Indonesia*. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance.

Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the internet is hiding from you*. New York: Penguin Press.

Setyaningrum, A., & Nugroho, Y. (2021). Disinformation and polarization in Indonesian digital politics. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(3), 345–365.

Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The platform society: Public values in a connective world*. Oxford: Oxford University Press.

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*. Strasbourg: Council of Europe.

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. New York: PublicAffairs.